

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov DKI Bakal Rangkul Swasta

► Untuk Fasilitasi Rusunami DP Rp 0

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal bekerja sama dengan swasta untuk memfasilitasi rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan DP Rp 0. Demikian diungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, akhir pekan kemarin.

Hal ini karena dipicu pemangkasan dana talangan untuk uang muka pembelian rusun tersebut sebesar Rp 1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020. "Dari sekian jumlahnya menjadi tinggal Rp 500 miliar di 2020. Kondisi ini memacu kami agar dari sektor swasta mana, yang mau bergabung lagi," ucap Kelik. Ia menyebutkan akan memetakan pihak swasta yang mau bekerja sama mendukung pembangunan ini agar terus



Kelik Indriyanto

Kompas.com/Nursita Sari

berjalan.

"Cuma kami mau memetakan dulu nih, swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini. Jadi semangat kami pendaftaran kami akan terima. Tidak ada pada istilahnya, intinya program jalan terus," tuturnya. "Sambil kami nanti mencari mana yang bisa tersedia dulu di 2020, kan masih butuh proses pembangunan juga," lanjut dia. Kelik memastikan rusunami DP 0

rupiah akan terus dibangun karena program tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kalau kami terus terang sesuai target kita tadi RPJMD untuk menambah tersedianya hunian pada masyarakat yang sasaran kita, target kita memang itu, pembangunan rakyat tadinya," ucap Kelik. Dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP 0 rupiah dipangkas Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, dana talangan yang akan tersedia hanya Rp 500 miliar. Pemprov DKI Jakarta mulanya mengajukan anggaran dengan nomenklatur Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebagai bentuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020 yang diserahkan pada Juli 2019. Namun, dipangkas menjadi Rp 1 triliun. (**kompas.com**)